

**MODEL PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
MINAPOLITAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
program study Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Sutan Abdul Fasha Hutagalung
NPM : 1505180033
Program Study : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SUTAN ABDUL FASHA HUTAGALUNG
N P M : 1505180033
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : MODEL PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
MINAPOLITAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNL, M.Si)

Penguji II

(SRI ENDANG RAHAYU, SE., MSi)

Pembimbing

MUKMIN POHAN, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si



Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : SUTAN ABDUL FASHA HUTAGALUNG
N.P.M : 1505180033
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : MODEL PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
MINAPOLITAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

MUKMIN POHAN, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



H. JANURI, SE., MM., M.Si

ABSTRAK

SUTAN ABDUL FASHA HUTAGALUNG. NPM: 1505180033. “Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah”. Skripsi. 2019.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lokasi pembangunan dan pengembangan Minapolitan. Program minapolitan di Kabupaten ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah jika dikelola dengan baik dan terencana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan terhadap konsep perencanaan dan pengembangan wilayah minapolitan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif untuk menentukan konsep perencanaan pengembangannya,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan wilayah minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah namun yang pasti belum ada kejelasan kapan tepatnya rancangan tersebut dapat direalisasi secara menyeluruh. Tapanuli Tengah sangat layak menjadi poros minapolitan, dengan didukung keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, yang letaknya di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kata Kunci : Minapolitan, Perencanaan Pengembangan, PPN Sibolga

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menguntungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keahliannya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan dan kesempatan serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang dimaksud untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi Strata-1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar besarnya kepada pihak yang banyak membantu dan memberi masukan pada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi, khususnya yang sangat istimewa untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya banggakan ayahanda Erwin Hutagalung, SH dan Ibunda Darpinah Harahap, SH serta kakak saya Putri Ahadiyah Hutagalung SE, dan adik-adik saya Elsa, Patih, Kaisar, dan juga kepada semua keluarga yang tiada henti memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri SE, MM. M, Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Mukmin Pohan SE., M.Si. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan arahan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Sahabat-sahabat saya Hajizal simarmata, Ahmadan Nuari Pane, Adam nur Syafwan, Dkk, serta teman seperjuangan saya dari Jurusan Ekonomi Pembangunan, terima kasih atas dukungannya selama ini pada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun dari penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna penyempurnaan Skripsil ini, akhirnya atas bantuan dan motivasi yang di berikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka Skripsi ini dapat diselesaikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan do'a dan puji syukur kepada ALLAH SWT, berharap Skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna untuk kedepannya, Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan,

2019

SUTAN ABDUL FASHA HUTAGALUNG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	25
1.3 Batasan Masalah	26
1.4 Rumusan Masalah.....	26
1.5 Tujuan Penelitian.....	26
1.6 Manfaat Penelitian.....	26
1.6.1 Manfaat Akademik	27
1.6.2 Manfaat Non-Akademik.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	28
2.1 Uraian Teoritis	28
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	28
A. Teori Klasik	28
B. Teori Neo-Klasik	32
2.1.2 Teori Pendapatan Nasional	39
A. Metode Penghitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran	39
B. Metode Penghitungan GDP Berdasarkan Pendapatan.....	41

2.2 Penelitian Terdahulu	42
2.3 Kerangka Konseptual.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.2.1 Tempat Penelitian	45
3.2.2 Waktu Penelitian.....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Teknik Analisis Data	46
3.5.1 Metode Analisis Deskriptif.....	46
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Geografi dan Demografi	47
4.1.1 Letak Geografis	47
4.1.2 Kondisi Topografi.....	49
4.1.3 Kondisi demografi	51
4.1.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah	52
4.2 Perkembangan Sektor Perikanan di Sumatera Utara dan Tapanuli Tengah	54
4.2.1 Perkembangan Sektor Perikanan di Sumatera Utara	54
4.2.2 Perkembang Sektor Perikanan di Tapanuli Tengah.....	60
4.3 Konsep Perencanaan Pengembangan Wilayah Minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah Pasca Desentralisasi Fiskal	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha/Kategori 2015-2017 (Miliar Rupiah)	6
Tabel 1.2 [Seri 2010] PDB Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2014-2019	8
Tabel 1.3 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi (Ton) 2014-2016	13
Tabel 1.4 [Seri 2010] PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	15
Tabel 1.5 [Seri 2010] Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) 2014-2016	16
Tabel 1.6 Produksi Perikanan Tangkap Sumatera Utara Tahun 2015-2017	18
Tabel 1.7 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapanga Usaha 2014-2018 (Persen) Di Kabupaten Tapanuli Tengah	19
Tabel 1.8 Produksi Perikanan laut Dan Harga Ikan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Tapanuli Tengah 2015	21
Tabel 4.1 Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2012.....	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Ratio Jenis Kelamin Kabupaten Tapanuli Tengah	52
Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Tanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut lapangan Usaha (Juta Rupiah)	53
Tabel 4.4 Ekspor Provinsi Sumatera Utara Dan Shere Sektor Perikanan Sumatera Utara 2015-2017.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Produksi Perikanan Nasional	11
Gambar 1.2 Produksi Perikanan Laut Tahun 2015-2017 Lima Provinsi Terbesar Produksi Perikanan Tangkap	14
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	44
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	58
Gambar 4.2 Produksi Perikanan Sumatera Utara 2015-2017	56
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Sumatera Utara Tahun 2015- 2017.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor perikanan dikelola secara serius, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan, Mulyadi (2005).

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI. Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena

menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Luas total wilayah Indonesia adalah 7.9 juta km² terdiri dari 1.8 juta km² daratan, 3.2 juta km² laut teritorial dan 2.9 juta km² perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km² tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km serta luas laut sekitar 2,7 juta km² sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*). Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta posisinya yang berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional akan mampu mendatangkan sebuah keuntungan tersendiri secara ekonomis bagi Indonesia dalam menjalin suatu hubungan diplomasi dengan berbagai negara di seluruh belahan dunia, yang nantinya hal tersebut akan berdampak besar bagi Indonesia terlebih di era keterbukaan seperti sekarang ini, Wolverine (2018).

Memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai jalan diplomasi akan memberi kesempatan bagi Indonesia dalam mempererat jalinan kerjasama dengan negara lain. Memilih dan memilah kepentingan Indonesia dalam negosiasi merupakan sebuah langkah yang nantinya harus diambil oleh pemerintah dalam menciptakan suatu hubungan simbiosis mutualisme, mengingat Indonesia terletak di *world cross position*.

Waterfront City adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “*waterfront*” dalam Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan, Echols (2003). *Waterfront City/Development* juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan, Henry Roy (2014).

Menurut Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pedoman Kota Pesisir tahun 2006 mengemukakan bahwa Kota Pesisir atau *waterfront city* merupakan suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya. Pada awalnya *waterfront* tumbuh di wilayah yang memiliki tepian (laut, sungai, danau) yang potensial, antara lain: terdapat sumber air yang sangat dibutuhkan untuk minum, terletak di sekitar muara sungai yang memudahkan hubungan transportasi antara dunia luar dan kawasan pedalaman, memiliki kondisi geografis yang terlindung dari hantaman gelombang dan serangan musuh.

Di wilayah Barat Indonesia, Daerah Otorita Batam yang merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau memegang peranan penting dalam pembangunan Kota berkonsep *WaterFront City*. Batam yang berdekatan dengan Negara Tetangga Singapura, memang diprioritaskan sebagai Pusat Perdagangan Terbesar di Barat Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. Batam yang merupakan wilayah segitiga emas ASEAN “Indonesia, Malaysia, Singapura” merupakan pintu utama bagi Pasar Bebas

ASEAN. Wajar jika Pemerintah Daerah sangat memperhatikan Kota berbasis pelabuhan ini. Banyak Hotel, Mall, dan Pusat Perdagangan yang dibangun di sepanjang pantai Kota Batam. Coastarina merupakan wilayah terpadu Batam yang memadukan Pantai sebagai Pointnya, Administrator (2016).

Besarnya potensi kekayaan laut yang dimiliki Indonesia, harus dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Upaya Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia patut untuk diapresiasi dan didukung secara penuh. Faktor sumber daya, kedaulatan, ekosistem dan geografis yang strategis, menjadi beberapa instrumen penting yang dapat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh sebab itu, Instrumen-instrumen ini harus terus dikembangkan dan dijaga, agar mimpi agar Indonesia untuk bisa menjadi poros maritim dunia bisa terealisasi, Faruk (2017).

Pembangunan di Indonesia diartikan sebagai upaya-upaya yang direncanakan dan diorganisasikan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus mempunyai dampak atas pembangunan di daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna

penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, Arsyad (1999). Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Upaya pembangunan tersebut harus dilakukan pada semua sektor salah satunya seperti sektor perikanan.

Karakter geografis dan kandungan sumberdaya perikanan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan (*justifikasi*) bahwa Indonesia merupakan Negara bahari dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki peluang amat potensial untuk dimanfaatkan dan dikelola guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perikanan diharapkan dapat menjadi indikator dalam pembangunan perekonomian terutama untuk meningkatkan perluasan lapangan kerja. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai melalui kerjasama dan dukungan, terlebih bagi pemerintah pusat.

Dalam mendukung perkembangan potensi perikanan, pelatihan sumber daya dan keahlian sangat diperlukan, karena keahlian masyarakat dalam mengembangkan potensi perikanan masih sangat terbatas khususnya dalam memahami zona-zona eksklusif wilayah laut. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya informasi. Pendidikan yang kurang menghambat berkembangnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan nilai PDB

Indonesia. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menempati posisi ketiga setelah sektor Industri pengolahan dan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup besar meski tidak terlalu menonjol akan tetapi bisa juga menjadi sektor andalan bagi perekonomian, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah merupakan yang memberikan kontribusi terendah namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan tapi tidak terlalu besar dalam kurun waktu tiga tahun.

Tabel 1.1
Nilai Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha/Kategori 2015-2017 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan (2010)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1555207	1671330.3	1785880.7	1171445.8	1210749.8	1256894.3
Pertambangan dan Penggalian	881694.1	890868.3	1028772.2	767327.2	774593.1	779925.4
Industri Pengolahan	2418891.7	2545203.5	2739415	1934533.2	2016876.8	2103066.4
Pengadaan Listrik dan Gas	129833.7	142344.4	162339.9	94894.8	100009.9	101551.3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8546.3	8942.5	9720.3	7369	7634.5	7986.4
Konstruksi	1177084.1	1287659.3	1409833.8	879163.9	925062.5	987883.5
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1532876.7	1635259	1767718.3	1207164.5	1255759.4	1311463.7
Transportasi dan Pergudangan	578464.3	644999.5	735229.6	348855.9	374843.4	406679.4

Akomodasi dan Makan Minum	341555.8	363055.5	387467.1	268922.4	282823.4	298514.9
Informasi dan Komunikasi	406016.5	449188.9	515888.9	421769.8	459208.1	504278.9
Jasa Keuangan dan Asuransi	464399.9	520087.5	571128.5	347269	378193.1	398919
Real Estate	327601.4	350488.2	379782.5	266979.6	279500.5	289789.4
Jasa Perusahaan	190267.9	211623.6	238217	148395.5	159321.7	172763.8
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	449382.4	479793.6	502238.9	310054.6	319946.1	326526.8
Jasa Pendidikan	387611.4	418346.8	446785.3	283020.1	293779.7	304525
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	123191.5	132544.6	144966.5	97465.8	102487.8	109448
Jasa Lainnya	190581	211455.6	239122	144904.2	156532.4	170073.7
PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)	11526332.8	12406774.1	13588797.3	8982517.1	9434632.3	9912749.3

Sumber : PDB seri 2010 ADH Berlaku dan ADH Konstan (www.bps.go.id)

Nilai Produk Domestik Bruto Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami kenaikan. Seperti tahun 2015 nilainya yaitu 1555207 miliar rupiah mengalami kenaikan sebesar 116123 miliar rupiah menjadi 1671330 miliar rupiah di tahun 2016, di tahun 2017 juga mengalami kenaikan menjadi 1785880 miliar rupiah. Tidak hanya Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2015 nilainya sebesar 117144 miliar rupiah mengalami kenaikan di tahun berikutnya, dan di tahun 2017 nilainya sebesar 1256894 miliar rupiah.

Sektor perikanan merupakan sektor pertanian yang menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan perekonomian Indonesia. Salah satu sub sektor pertanian yang cukup berpotensi dalam perekonomian Indonesia adalah perikanan. Berdasarkan Tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
[Seri 2010] PDB Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah), 2014-2019

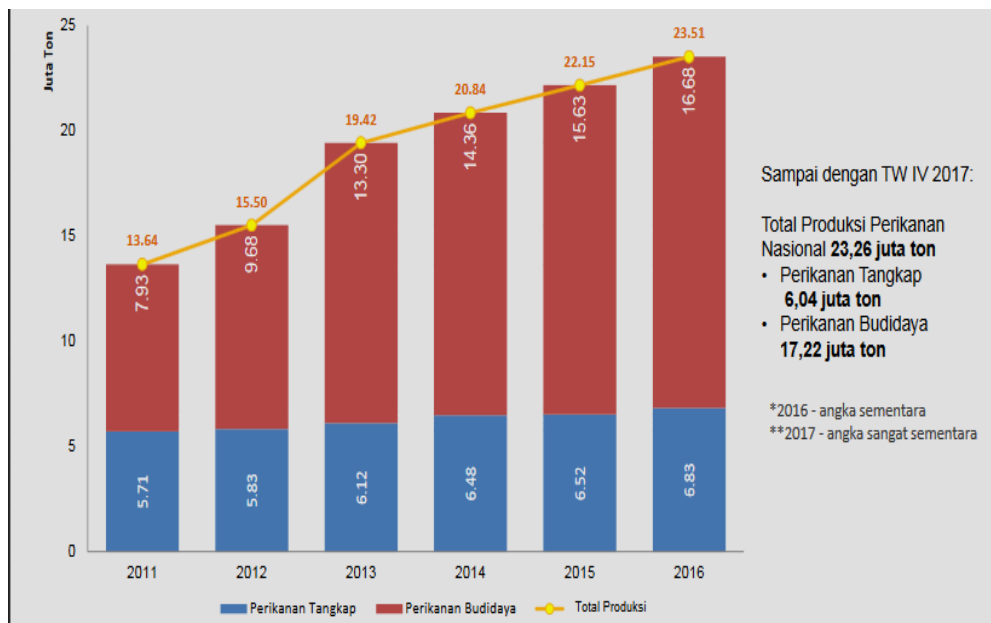
PDB Lapangan Usaha	[Seri 2010] PDB Seri 2010 [Milyar Rupiah] Harga Berlaku				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian,Perkebunan, Perikanan	1409655.7	1555207	1671597.8	1787285.2	1900348.5
Pertanian,Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	1089549.7	1183968.6	1266865.4	1346867.3	1417074.5
Tanaman Pangan	343252.3	397408.61	425185.6	438889.5	449822.3
Tanaman Holtikultura	160568.6	174453.2	187402.6	197320.7	218712.4
Tanaman Perkebunan	398260.7	405291.5	428782.6	471307.8	489248.8
Peternakan	167008	184151.5	201123.5	213306.1	231710.9
Jasa Pertanian dan Perburuan	20460.1	22663.8	24371.1	26043.2	27580.1
Kehutanan dan Penebangan Kayu	74618	82321.8	87542.4	91564.1	97337.6
Perikanan	245488	288916.6	317190	348853.8	385936.4
Pertambangan dan Penggalian	1039423	881694.1	890868.3	1029554.6	1198987.1
Pertambangan Minyak,gas,dan Panas bumi	509783.3	384515.9	364985.6	391449.9	460169.9
Perambangan Batubara dan Lignit	259766.6	229973.9	231697.8	323364.5	401276.9
Pertambangan Biji Logam	93615.2	74264.2	73301	94322.3	111321.4
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	176257.9	192940.1	220883.9	220417.9	226218.9
Industri Pengolahan	2227584	2418891.7	2545203.6	2739711.9	2947299.2
Industri Batubara dan Pengilangan Migas	337200.6	320845.1	286400	309372.7	332147.4
Industri Pengolahan Non Migas	1890383.4	2098046.6	2258803.6	2430339.2	2615151.8
Industri Makanan dan Minuman	562016.6	647071.9	740810.2	834425.1	927443.5
Industri Pengolahan Tembakau	95668.1	108651.6	117086.3	122229.6	131937.3
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	139031.6	139393.6	143545	150535.3	168545.2
Industri Kulit, Barang dari	28600.2	31440.9	35214.1	36988.8	41761

Kulit dan Alas Kaki					
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	76071.9	77993.4	80077.6	81580.8	83710
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	84372.5	87760.4	89650	96616.2	101758.2
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	180037.2	209788.2	223404.7	236192.9	239678
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	80262.9	85951.4	79100.9	85869.6	92662.6
Industri Barang Galian bukan Logam	76852	83371	89056	89605.8	93166.9
Industri Logam Dasar	82118.8	90159.3	89559.7	98845.5	111341.3
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	198080.6	226678.1	241756.5	252870.9	257687
Industri Mesin dan Perlengkapan	33078.8	37287.5	40169.5	43093	47879.6
Industri Alat Angkutan	207401.4	220511	236558.9	246916.1	260986.8
Industri Furnitur	28117.7	31339.7	32124.2	33851.1	35487.6
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	18673.1	20648.6	20690	20718.5	21151.8
Pengadaan Listrik dan Gas	114905.1	129833.7	142344.4	162339.9	176346.1
Ketenagalistrikan	84150.8	100645.2	112792.3	132975.9	144437.1
Pengadaan Gas dan Produksi Es	30754.3	29188.5	29552.1	29364	31909
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7840.6	8546.3	8909.4	9439.6	10015.5
Konstruksi	1041949.5	1177084.1	1287600.8	1410513.6	1562297
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1419239.4	1532876.7	1635410.4	1768896.1	1931911.3
Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	292839.1	311606.1	334787.8	356588.2	386949.9
Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1126400.3	1221270.6	1300622.6	1412307.9	1544961.4
Transportasi dan Pergudangan	466968.9	578464.3	644993.9	735229.6	797281.1
Angkutan Rel	4227.9	6577.3	7319.1	9127	10459
Angkutan Darat	225881.6	281079.1	300985	3283306.7	354092.7
Angkutan Laut	36074.9	39307.3	39907.1	41985.8	45108.9
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	13137.3	14266.8	14185.5	15077.5	16045.2
Angkutan Udara	108791.9	143664	177904.1	220966.6	240466
Pergudangan dan Jasa	78855.3	93569.8	104693.1	119721	131109.3

Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir					
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	321962.1	341555.8	363055.5	386937	412523.1
Penyediaan Akomodasi	74255.1	80790.5	86421.4	91877.2	96327.8
Penyediaan Makan Minum	246807	260765.3	276634.1	295059.8	316195.3
Informasi dan Komunikasi	369457.3	406016.5	449188.7	513715.8	559054.6
Jasa Keuangan dan Asuransi	408438.8	464399.9	520206.8	571185.9	616252.8
Jasa Perantara Keuangan	256028.9	290943.1	327378.2	353059.7	375333.9
Asuransi dan Dana Pensiun	87336.5	99041.1	109355.2	124126.2	137689.8
Jasa Keuangan Lainnya	55244.7	63465.3	71857.2	81408.8	90083.1
Jasa Penunjang Keuangan	9828.7	10950.4	11616.2	12591.2	13146
Real Estate	294573.4	327601.4	350488.2	382474.1	406635.5
Jasa Perusahaan	165990.6	190267.9	211623.6	238217	267094
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404629.6	449382.4	476490.9	498233	541741.2
Jasa Pendidikan	341818.4	387611.4	417344.8	446254.5	482134.1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109147.2	123191.5	132100.5	144621.9	157923
S,T,U. Jasa lainnya	163548.8	190581	2114227.9	2239259	268632.7
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	10306232.4	11163205.7	11958855.5	13063868.7	14236476.8
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	263472.9	363127.1	442873	523343.9	600880.7
PRODUK DOMESTIK BRUTO	10569705.3	11526332.8	12401728.5	13587212.6	14837357.5

Sumber : PDB seri 2010, (www.bps.go.id)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya yang justru menunjukkan kontribusi yang besar, berbeda dengan sektor perikanan yang menunjukkan kontribusi yang cukup rendah yaitu sebesar 245488 di tahun 2014, tetapi jika dilihat sektor perikanan mengalami peningkatan ditahun 2015 sebesar 288916,6 dan terus mengalami peningkatan yang signifikan secara bertahap.



Sumber : *Produksi Perikanan Nasional* (www.akuakultur.com)

Gambar 1.1 Produksi Perikanan Nasional

Produksi Perikanan Indonesia sangat Melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional. tahun 2011 menunjukkan, produksi perikanan tangkap mencapai 5,71 juta ton dan Meningkatkan menjadi sekitar 5,83 juta ton tahun berikutnya. Di tahun 2013 perikanan tangkap laut mencapai peningkatan sekitar 6,12 juta ton. Bahkan untuk tahun-tahun berikutnya produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan secara signifikan hingga tahun 2016 sebesar 6,83 juta ton

Tidak hanya dalam sektor perikanan tangkap saja, untuk produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 produksi perikanan budidaya mencapai 7,93 juta ton dan mengalami meningkat pada tahun 2012 sebesar 9,68 juta ton dan bahkan ditahun-tahun selanjutnya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini ,menunjukkan bahwa perikanan di Indonesia bisa menjadi sektor unggulan dalam perekonomian nasional.

Sektor perikanan menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014, rumah tangga di Indonesia yang mengandalkan hidupnya dari menangkap ikan di perairan umum dan laut sebanyak 964.231 atau sekitar 1,5 persen dari rumah tangga di Indonesia. Dari jumlah itu, rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin ada 23,79 persen, nelayan di perairan umum 24,98 persen, sedangkan budidaya 23,44 persen. Rumah tangga usaha penangkapan ikan di laut memiliki pendapatan per kapita lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga usaha penangkapan ikan di perairan umum dan rumah tangga usaha budidaya ikan.

Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita nelayan di perairan umum adalah Rp642.350, sedangkan nelayan laut Rp737.030. Pendapatan rumah tangga nelayan di perairan umum adalah Rp2.338.600 dan nelayan laut Rp3.030.200. [Asian Development Bank](#) menyatakan penduduk miskin hidup dengan penghasilan di bawah US\$2. Dengan kurs sekitar Rp13.000 per dolar, penghasilan sebulan penduduk miskin di bawah Rp780.000. ADB mencatat ada 11,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah kemiskinan. Sebagai catatan, berdasarkan data BPS [pada bulan Maret 2015](#), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Tabel 1.3
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi (ton) 2014-2016

Provinsi	Perikanan Laut			Perairan Umum		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Aceh	157,944	173,034	189,262	1,540	1,734	1,727
Sumatera Utara	484,313	494,724	175,638	87,836	84,825	44,583
Sumatera Barat	214	204,771	200,610	10,464	10,408	9,495
Riau	107,305	105,298	102,101	18,384	17,099	27,256
Jambi	48,031	43,204	47,134	7,203	6,412	7,553
Sumatera Selatan	48,186	61,392	69,583	53,377	114,789	117,954
Bengkulu	60,705	62,291	62,426	1,686	1,804	1,798
Lampung	157,968	163,384	164,420	6,187	5,559	7,442
Kep. Bangka Belitung	203,285	139,633	164,420	-	-	-
Kep. Riau	139,331	149,745	151,215	-	-	-
DKI Jakarta	226,060	289,214	143,640	-	-	-
Jawa Barat	206,156	271,332	218,194	12,848	21,317	15,915
Jawa Tengah	242,072	336,047	334,298	18,945	16,570	18,626
DI Yogyakarta	5,387	3,918	3,254	1,609	1,404	1,748
Jawa Timur	385,878	402,569	390,271	13,493	13,960	17,378
Banten	59,302	68,006	52,445	1,514	743	825
Bali	116,910	104,970	102,336	1,332	1,278	1,271
NTB	227,084	208,334	170,166	3,560	3,416	3,179
NTT	111,145	118,391	128,931	-	-	-
Kalimantan Barat	165,622	136,301	113,430	27,297	29,886	15,997
Kalimantan Tengah	66,384	100,427	123,804	37,700	30,180	27,474
Kalimantan Selatan	178,916	170,861	176,506	65,667	70,435	71,229
Kalimantan Timur	111,199	99,940	101,718	43,348	9,410	41,462
Kalimantan Utara	-	15,801	16,284	-	1,030	1,028
Sulawesi Utara	295,204	257,774	302,864	1,163	1,307	1,162
Sulawesi Tengah	263,887	171,565	210,141	3,428	3,453	2,192
Sulawesi Selatan	287,897	318,394	295,143	14,296	10,673	12,704
Sulawesi Tenggara	150	146,325	185,429	2,931	2,875	2,259
Gorontalo	102,534	104,437	117,314	809	1,048	1,048
Sulawesi barat	46,717	55,759	64,336	-	-	-
Maluku	538,121	617,985	583,639	27	19	-
Maluku Utara	218,097	251,110	254,856	-	-	-
Papua Barat	119,984	136,393	151,587	219	276	378
Papua	290,438	221,340	222,528	9,829	11,224	11,039
Indonesia	6,037,654	6,204,668	6,115,469	446,692	473,134	464,722

Sumber : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (www.bps.go.id)

Dari tabel diatas diketahui produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara bukanlah yang tertinggi, melainkan berada di Provinsi Maluku yaitu sebesar 538,121 ton di tahun 2014 dan meningkat ditahun 2015 sebesar 617,985 ton. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ke-2 sebesar 484,313 ton ditahun 2014 dan

juga meningkat ditahun 2015 sebesar 494,724 ton. Produksi perikanan Terendah berada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang hanya sebesar 150 ton ditahun 2014, akan ditahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 146,325 ton dan ini merupakan peningkatan yang sangat menonjol dimana produksinya tidak mengalami penurunan ditahun 2016, tidak seperti Provinsi Sumatera Utara yang mengalami penurunan yang terbilang cukup jauh yakni dari 494,724 ton ditahun 2015 turun secara drastis ditahun 2016 sebesar 175,638 ton.



Sumber: Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi (www.kkp.go.id)

Gambar 1.2 Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2015-2017 Lima Provinsi Terbesar Poduksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan data di atas pada tahun 2015 dan 2016 Sumatera Utara merupakan provinsi yang berada pada urutan ke dua sebagai penghasil perikanan tangkap laut, yang pertama di tepati oleh provinsi Maluku. Sedangkan pada tahun 2017 Sumatera Utara berada paling teratas atas produksi perikanan tangkap laut.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi di sub sektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah penyumbang terbesar kedua setelah Provinsi Maluku pada produksi perikanan tangkap di Indonesia. Potensi Sumatera Utara yang melimpah ini diharapkan dapat menjadi subsektor unggulan perekonomian.

Hal ini menunjukkan bahwa potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian suatu daerah tanpa melihat pelaku ekonominya.

Provinsi Sumatera Utara mempunyai 3 sektor perekonomian dengan 8 sub sektor dalam membangun daerahnya yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa-jasa. Nilainya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
[Seri 2010] PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori PDRB	2013	2014	2015	2016
A. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	99894566.3	104262829.8	109962980.4	115308876.9
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	87560022.4	91363870.6	96403056	101270274.9
a. Tanaman Pangan	15006170.2	14767590	16214340.5	17811352.6
b. Tanaman Hortikultura Semusim	857484	779183.1	692306.6	701389.1

c. Perkebunan Semusim	249963.8	245960.8	260369.2	275861.5
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	10087203.1	10427086.7	10492602.3	10722002.1
e. Perkebunan Tahunan	53089124.6	56375264.7	59387861	61848541.4
f. Peternakan	7473191.5	7945618.3	8472243.8	9046404.2
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	796885.2	823167	843132.6	864724.1
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	3823986.2	3926110.3	4078864.9	4013318.3
3. Perikanan	8510557.8	8972848.9	9481059.5	10025283.8

Sumber : [Seri 2010] PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan (www.sumut.bps.go.id)

Kontribusi sub sektor perikanan pada perekonomian Sumatera Utara relatif masih rendah dibandingkan kontribusi subsektor perkebunan dan subsektor tanaman pangan. Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cenderung naik. Kontribusi subsektor ini tahun 2013 sebesar 2,26 persen yang meningkat menjadi 2,30 persen tahun berikutnya. Tahun 2016 kontribusinya sebesar 2,33 persen turun dibandingkan kontribusi pada tahun 2015 yang sebesar 2,37 persen. Meskipun kontribusi subsektor perikanan dalam perekonomian Sumatera Utara masih relatif kecil namun laju perkembangannya tidak dapat diabaikan. Masih rendahnya kontribusi subsektor perikanan terhadap perekonomian di Sumatera Utara menunjukkan bahwa potensi perikanan yang ada belum dikelola secara maksimal dan masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap subsektor ini.

Tabel 1.5
[Seri 2010] Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) 2014 – 2016

Lapangan Usaha		2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	23.26	22.02	21.65
B	Pertambangan dan Penggalian	1.32	1.34	1.35
C	Industri Pengolahan	19.97	20.21	19.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.11	0.1

E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.1	0.1	0.1
F	Konstruksi	13.31	13.61	13.4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Repasi Mobil dan Sepeda Motor	17.17	17.41	17.89
H	Transportasi dan Pergudangan	4.96	4.99	5.07
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	2.35	2.41	2.38
J	Informasi dan Komunikasi	1.97	1.95	1.94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.27	3.35	3.3
L	Real Estat	4.37	4.5	4.73
M,N	Jasa Perusahaan	0.93	0.95	1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jasa Sosial Wajib	3.61	3.71	3.64
P	Jasa Pendidikan	1.9	1.88	1.94
Q	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	0.88	0.93	0.95
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.52	0.53	0.56
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100
PDRB Tanpa Migas		99.86	99.87	99.89

Sumber : [Seri 2010] Distribusi Persentase PDRB Sumatera Utara (www.sumut.bps.go.id)

Kontribusi lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB merupakan kontribusi terkecil, yaitu masing-masing sebesar 0.1 dan 0.12 namun terus menurun di angka 0.1 persen di tahun 2016, dan kontribusi terbesar adalah berada di sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan sebesar 23.26 persen.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Tapanuli Tengah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Tapanuli Tengah. Sumbangan terbesar pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kemudian

lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Industri Pengolahan, serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 3 (tiga) persen.

Tabel 1.6
Produksi Perikanan Tangkap Sumatera Utara tahun 2015-2017 (ton)

kabupaten/kota	Tahun		
	2015	2016	2017
Kabupaten			
1 Nias	4 232,8	889,1	12
2 Mandailing Natal	8 767,1	4 575,2	8 495
3 Tapanuli Selatan	87,4	72,7	161
4 Tapanuli Tengah	51 028,6	4 100,1	299 499
5 Tapanuli Utara	423	26,3	34
6 Toba Samosir	32,7	939,9	1 001
7 Labuhanbatu	1 006,7	6 799,2	17 375
8 Asahan	13 844,3	4 764,4	70 892
9 Simalungun	18 345,6	-	693
10 Dairi	10,1	239,3	997
11 Karo	0	38	11
12 Deli Serdang	12 951,3	23 866,5	39 334
13 Langkat	29 699,8	28 356,6	8 607
14 Nias Selatan	301,4	-	62
15 Humbang Hasundutan	0	149,1	536
16 Pakpak Bharat	997,2	-	0
17 Samosir	4 803,6	86,3	4 444
18 Serdang Bedagai	2 537,1	25 667,0	28 669
19 Batu Bara	92 532,4	27 810,5	20 768
20 Padang Lawas Utara	381,4	2 317,1	207
21 Padang Lawas	525,1	83,7	219
22 Labuhanbatu Selatan	219,1	10 713,0	122
23 Labuhanbatu Utara	284,6	54,3	903
24 Nias Utara	12 328,4	-	1 606
25 Nias Barat	21,1	1 959,6	12
Kota			
71 Sibolga	52 455,2	48 912,0	51 977
72 Tanjungbalai	2 350,1	34 785,8	168 154

73 Pematangsiantar	466,8	8,4	4
74 Tebing Tinggi	4	3,1	2,2
75 Medan	86 003,9	88 521,0	58 989
76 Binjai	0	-	3 289
77 Padangsidempuan	31,8	41,5	19
78 Gunungsitoli	3061	398,4	1 125
Sumatera Utara	61 4982	408 094,5	788 218

Sumber : Produksi Ikan menurut Asal Tangkapan Dan Kabupaten/Kota(www.sumut.bps.go.id)

Berdasarkan dari data Badan Pusat Sumatera Utara bahwa produksi ikan menurut asal tangkap kabupaten/kota di Sumatera Utara di tahun 2015 sebesar 61.4982 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 788.218 ton. Untuk Tapanuli Tengah sendiri produksi perikanan di tahun 2014 terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 51.028,6 namun ditahun 2015 produksinya mengalami penurunan yang sangat drastis dengan menyentuh angka 4100,1 ton, dan ditahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar 299,499 ton.

Tabel 1.7
Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014–2018
(Persen) Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian,Kehutanan,Perikanan	47,74	47,25	46,68	46,35	45,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
C	Industri Pengolahan dan	12,02	11,71	11,58	11,55	11,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,50	0,48	0,57	0,58
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
F	Konstruksi	10,95	10,90	11,17	11,62	11,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,53	11,05	11,47	11,39	11,74
H	Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,73	2,78	2,78	2,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,42	1,42	1,43	1,44	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	1,03	1,03	0,99	1,00
L	Real Estat	1,98	1,97	1,98	1,99	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	8,38	8,69	8,69	8,62	8,62

	dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	1,03	1,02	1,00	0,97	0,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,35	0,34	0,32	0,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (www.tapanulitengahkab.bps.go.id)

Kontribusi lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan lapangan usaha Jasa lainnya terhadap PDRB merupakan kontribusi terkecil, yaitu masing-masing sebesar 0,13 persen dan 0,09 persen secara berurutan. Kebutuhan atau komoditas perikanan yang dihasilkan oleh sub sektor perikanan diperkirakan akan meningkat dalam berjalannya waktu, hal tersebut dapat kita lihat dari peningkatan jumlah dan volume komoditas perikanan itu sendiri. Peningkatan tersebut secara umum dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besarnya kebutuhan akan komoditas perikanan tersebut.

Sektor perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk sektor perikanan tangkap terdiri dari penangkapan ikan di laut yaitu setiap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan yang berada di wilayah laut Indonesia, sedangkan penangkapan ikan di perairan umum yaitu penangkapan ikan oleh nelayan yang dilakukan di sugai, danau, waduk.

Untuk budidaya perikanan terdiri atas budidaya air tawar dilakukan di daratan dimana terdapat sumber air tawar seperti saluran irigasi, air hujan dan air sumur. budidaya perikanan air payau umumnya dilakukan di kawasan pesisir seperti pantai, muara sungai, serta kawasan lainnya yang masih dipengaruhi pasang surut air laut. Budidaya perikanan di perairan umumnya pembudidayaan ini dilakukan di danau ataupun waduk. Budidaya di laut dilakukan di laut atau lokasi dimana sumber air laut

relatif mudah di akses. Adapun Produksi Perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.8
Produksi Perikanan Laut dan Harga Ikan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Tapanuli Tengah 2015

Komoditi/	Kualitas/	Produksi/	Harga/	Komoditi/	Kualitas/	Produksi/	Harga/
<i>Commodity</i>	<i>Quality</i>	<i>Production</i>	<i>Price</i>	<i>Commodity</i>	<i>Quality</i>	<i>Production</i>	<i>Price</i>
		(ton)	(rp/kg)			(ton)	(rp/kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(5)	(6)
Sebelah	Segar	1 005,7	20 000	Alu-alu	Segar	844	15 000
Peperek	Segar	549,9	19 000	Layang	Segar	654	10 000
Mayung	Segar	732	15 000	Selar	Segar	1 380,2	20 000
Letengek	Segar	567,4	16 000	Tenggiri	Segar	1 206,6	25 000
Merah Bumbungan	Segar	571,3	35 000	Tongkol	Segar	539,7	20 000
Kerapu	Segar	910	40 000	Udang Windu	Segar	677	30 000
Kuro/Senangin	Segar	801,3	21 000	Udang Putih	Segar	371	35 000
Kakap	Segar	552	45 000	Udang Dogol	Segar	1 714	40 000
Kurisi	Segar	902,0	15 000	Cakalang	Segar	4 558,3	20 000
Teri	Segar	1 719,4	18 000	Tuna	Segar	892,2	30 000
Tembang	Segar	405,7	9 000	Ikan Lainnya	Segar	997,5	8 000
Gelamah	Segar	410,9	21 000	Udang Lainnya	Segar	691,9	25 000
Cucut	Segar	352,4	10 000	Lencam	Segar	493,8	16 000
Pari	Segar	641,7	15 000	Ekor Kuning	Segar	1 605,5	18 000
Parang-parang	Segar	0	0	Bawal Hitam	Segar	777,6	38 000
Kembung	Segar	2 613,9	30 000	Kuwe	Segar	975,3	28 000

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tapanuli Tengah
(www.tapanulitengahkab.bps.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa komoditi Ikan cakalang merupakan produksi paling tinggi yaitu sebanyak 4558,3 ton pada tahun 2015 disusul komoditi ikan kembung dengan produksi sebanyak 2613,9 ton di tahun yang sama. Bukan hanya bergerak dibidang perikanan biasa, Produksi perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah juga bergerak di industri Perikanan, tepatnya di daerah Pondok Batu, Kecamatan Sarudik ada perusahaan swasta yang bergerak dibidang industri *Cold Storage*, pabrik es, pabrik tepung ikan, pengemasan ikan hasil tangkap, Pengasinan Ikan, dan Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor – Impor Hasil Perikanan Tangkap.

Minapolitan terdiri dari dua kata mina artinya ikan dan politan artinya kota, jadi minapolitan adalah kota perikanan. Kawasan Minapolitan berdasarkan turunan. kawasan Agropolitan : adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis, Wandoka (2012).

Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya, adapun tujuan dari Minapolitan adalah :

1. Menghasilkan Rencana Detail Kawasan Minapolitan yang merupakan kajian menyeluruh terhadap semua aspek utama pembangunan kelautan dan perikanan dengan data-data dasar yang meliputi :
 - a. Sumber daya alam di kawasan dan sekitarnya.
 - b. Keberadaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di dalam kawasan.
 - c. Sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan pengembangan kawasan.
 - d. Sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan.
2. Menghasilkan proyeksi arah, skenario dan tahapan pengembangan kawasan minapolitan dalam jangka menengah (5 tahun).

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan lokasi pembangunan dan pengembangan Minapolitan.

Mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan bahwa dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu sebagai berikut :

- Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan
- Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu sebagai berikut :

- Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat.
- Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan
- Penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat.

Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan yaitu :

- Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 421/DKP/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Minapolitan Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa Tim Koordinasi tersebut dibentuk guna mendukung keberhasilan revitalisasi perikanan perlu dikembangkan kegiatan terpadu dalam pembangunan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan. Pada tahun 2012, dilaksanakan penyusunan Road Map Minapolitan dan Master Plan Kawasan Minapolitan serta berbagai dukungan pembangunan infrastruktur di lokasi Minapolitan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Potensi sektor kelautan dan perikanan yang melimpah namun produksi hasil perikanan saat ini masih rendah
2. Sektor perikanan merupakan sektor potensial yang dikelola guna mencapai pertumbuhan ekonomi, namun sampai saat ini pengelolaannya belum maksimal
3. Program minapolitan belum tersosialisai dengan baik atau belum tepat sasaran sehingga pemahamannya kurang dengan potensi yang di miliki kawasan.
4. Masalah kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya masyarakat yang tinggal di pinggir laut.

1.3 Batasan Masalah

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini dibatasi pada masalah Perkembangan sektor perikanan khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dapat dijadikan untuk bahan dalam membuat perencanaan pembangunan wilayah minapolitan

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan batasan masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah perkembangan sektor perikanan di Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah?
2. Bagaimanakah konsep perencanaan dan pengembangan wilayah minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah pasca desentralisasi fiskal?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif perkembangan sektor perikanan di Indonesia Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Melakukan evaluasi kebijakan terhadap konsep perencanaan dan pengembangan wilayah minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah pasca desentralisasi fiskal

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya :

1.6.1 Manfaat Akademik

a. Bagi peneliti:

- 1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topic yang sama.
- 2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa:

- 1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.6.2 Manfaat Non-akademik

a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintahan.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Pembangunan adalah proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standart kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu, Todaro (2011).

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

A. Teori Klasik

a. Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan

memaksimalkan kesejahteraan mereka secara *agregate*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan, Jhingan (2012)

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luasa adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang, Jhingan (2012). Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- 1) Pembagian masyarakat secara lugas
- 2) Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- 3) Pengabaian pengusaha (wiraswasta)
- 4) Asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna
- 5) Asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner

b. David Ricardo

Menurut Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah dalam, Todaro (2011). Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan

tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

c. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut, Jhingan (2012).

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil,

perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

B. Neo Klasik

a. Teori Karl Marx

Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi dalam tiga hal, yaitu: dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir menawarkan jalan alternative tentang pembangunan ekonomi terencana, Jhingan (2012).

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

1. Akumulasi Kapital

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/ relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

2. Perkembangan sebagai proses Gradual / terus-menerus

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

3. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies & external economies. Internal Economices

timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan sebagainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

4. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

5. Aspek internasional perkembangan ekonomi

Tingkat perkembangan ekonomi:

b. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*, Jhingan (2012). Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan

pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa alam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Satagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan *output* masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs*). Inovasi disini bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi

tersebut nienyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut Sehumpeter, pembangunan ekonorni akan berkernbang pesat dalam lingkungan masyarakat yang rnenghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematkan kreativitas penduduknya, Jhingan (2012).

C. Analisis post Keynesian

Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan *aggregate* sama dengan penawaran *Aggregate*. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi, Jhingan (2012).

a. Teori Harrod-Domar

Model pertumbuhan ekonomi, Todaro (2011). Dibangun berdasarkan pengalaman Negara maju. Kesemuanya terutama dialamatkan kepada perekonomian kapitalis maju dan mencoba menelaah persyaratan pertumbuhan mantap (*steady growth*) dalam perekonomian seperti itu, Jhingan (2012). Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan. Model yang dibuat oleh Harrod dan Domar didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- 1) Ada equilibrium awal pendapatan dalam keadaan pekerjaan penuh
- 2) Tidak ada campur tangan pemerintah
- 3) Model ini bekerja pada perekonomian tertutup tanpa perdagangan luar negeri
- 4) Tidak ada kesulitan dalam penyesuaian antara investasi dan penciptaan kapasitas produktif
- 5) Kecenderungan menabung rata-rata sama dengan kecenderungan menabung marginal
- 6) Kecenderungan menabung marginal tetap konstan
- 7) Koefisien modal yaitu ratio stok modal terhadap pendapatan, diasumsikan tetap (*fixed*)
- 8) Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai seumur hidup
- 9) Tabungan dan investasi berkaitan dengan pendapatan tahun yang sama
- 10) Tingkat harga konstan, yaitu berupa uang sama dengan pendapatan nyata.
- 11) Tidak ada perubahan tingkat suku bunga
- 12) Ada proporsi yang tetap antara modal dan buruh dalam proses produktif
- 13) Modal tetap dan modal lancar disatukan menjadi modal.

b. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut, Todaro (2011):

- A. Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)

- B. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- C. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- D. Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- E. *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran. Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

c. Teori Harrod

Harrod menyelidiki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ($GC=IS$) dimana G adalah tingkat pertumbuhan output atau perbandingan antara naiknya *income* dan total *income* pada waktu tertentu. C adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan pendapatan (I/DY) dan S adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang, Todaro (2011).

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi, Todaro (2011).

2.1.2 Teori Pendapatan Nasional

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. “Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari output dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh, Quesney adalah dokter resmi bagi king louis xv dari Prancis”. Manurung (2008).

“Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi penerimaan orang lain. Ide bahwa belanja sama dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada output agregat dicatat pada sisi buku dan pendapatan dari sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut”. Manurung (2008)

A. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pengeluaran

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paaling mudah dalam memahami

pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen : konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu, Manurung (2008).

Konsumsi atau secara lebih spesifik pengeluaran konsumsi perorangan adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun, sop, dan pembelian barang tahan lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun.

Investasi, atau secara spesifik *investasi domestik swasta bruto* adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak digunakan pada saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik konsumsi dan investasi bruto pemerintah, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai

hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran tranfer, seperti social security, bantuan pemerintah kepada penerimaan bantuan dalam pengertian sebenarnya.

Komponen terakhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa (invisibles, seperti pariwisata, asuransi, akuntansi dan konsultasi). mengingat belanja untuk konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G), dan ekspor neto yaitu nilai ekspor (X), dikurangi dengan nilai impor (M), atau $(X-M)$. Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP.

B. Metode Perhitungan GDP Berdasarkan Pendapatan

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumber daya yang digunakan dalam produksi output tersebut yaitu upah, bunga, sewa dan laba dari

produksi. Harga *Hershey bar* mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga sehingga batayang permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan semua penjumlahan pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa Pengeluaran Agregat = GDP = Pendapatan Agregat.

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna atau dengan cara menghitung nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input dari perusahaan lain. Nilai tambah setiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

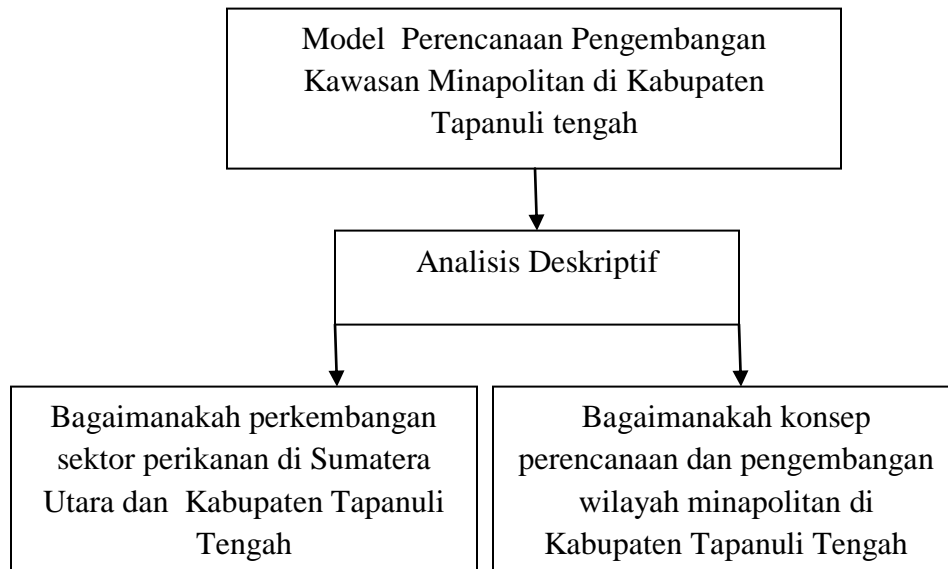
2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Darmawan L Cahya, Muhamad Daniel Mareza (2013)	Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan	1. Kawasan Minapolitan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan memiliki aksesibilitas dan kondisi fisik lingkungan yang baik serta sesuai untuk mendukung kegiatan minapolitan. 2. Kawasan Minapolitan Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sektor perikanan

		tangkap dan budidaya. Dengan komoditas unggulan ikan laut, rumput laut, udang dan Ikan kerapu.
Wirastika Adhihapsari, Bambang Semedi, Mohammad Mahmudi (2014)	Perencanaan Pengembangan Wilayah Kawasa Minapolitan Budidaya DI Gandusari Kabupaten Blitar	1. Budidaya lele layak untuk dikembangkan karena memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat dimanfaatkan menerapkan strategi kebijakan pertumbuhan agresif. 2. Pengujian statistik dengan menggunakan uji Regresi Berganda menunjukkan bahwa aspek usaha, pola pembiayaan, aspek pasar, aspek pemasaran, dan aspek teknis terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap jumlah penjualan budidaya lele di Kabupaten Demak.
Alfi Sahri R Baruadi, Domu Simbolon, Ari Purbayanto, Roza Yusfiandayani Corresponding author (2012)	Model Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Minapolitan Di Kabupaten Gorontalo Utara	Pengembangan perikanan tangkap berbasis minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara layak dikembangkan. Hal ini, karena didukung oleh sumberdaya perikanan yang masih bisa dikembangkan dan pemanfaatan saat ini masih dibawah MSY. Jenis ikan tersebut meliputi ikan layang, cakalang, tembang, tuna, teri sardin, selar, kembung, tongkol, kuwe, dan ikan kerapu.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur dari suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional. Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melakukan analisis studi deskriptif tentang pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Tapanuli Tengah.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, Sugiono (2005:21). Mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk Menggambarkan atau Menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan juli 2019 sampai dengan September 2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan sumber data tersebut antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah Metode dokumentasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang telah tercatat atau terdata dalam suatu laporan atau pembukuan, Kuncoro (2009). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BPS, Bappeda, dinas pemerintahan dan literatur.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, Kuncoro (2013).

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Geografi dan Demografi

4.1.1 Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m diatas permukaan laut dan terletak pada koordinat 1°11'00" - 2°22'0" LU dan 98°07' - 98°12' BT.

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 Km² 3,06 persen luas Provinsi Sumatera Utara dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah ± 4.000 km², sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia. Batas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat

Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelah Barat : Sibolga dan Samudera Indonesia

Sebelah Utara : Provinsi Aceh



Sumber : Kabupaten Tapanuli Tengah dalam angka 2012
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli tengah

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah $\pm 6.194,98$ km². Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 km² (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99 persen).

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah 2012

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas (km ²)	Persen (%)
1.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
2.	Badiri	7	2	129,49	5,90
3.	Sibabangun	6	1	284,64	12,97
4.	Lumut	5	1	105,98	4,83
5.	Sukabangun	6	-	49,37	2,25
6.	Pandan	2	20	36,31	1,65
7.	Sarudik	1	4	25,92	1,18
8.	Tukka	4	5	148,92	6,78

9.	Tapian Nauli	9	1	83,01	3,78
10.	Sitahuis	5	1	50,52	2,30
11.	Kolang	12	2	400,65	18,25
12.	Sorkam	17	4	116,25	5,30
13.	Sorkam Barat	10	2	44,58	2,03
14.	Pasaribu Tobing	9	-	103,36	4,71
15.	Barus	11	2	21,81	0,99
16.	Sosor Gadong	8	1	143,14	6,52
17.	Andam Dewi	13	1	122,42	5,58
18.	Barus Utara	6	-	63,02	2,87
19.	Manduamas	17	3	99,55	4,54
20.	Sirandorung	7	1	87,72	4,00
	Jumlah	159	56	2.194,98	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (www.tapteng.go.id)

4.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m diatas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m diatas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m diatas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m diatas permukaan laut dan kearah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak diketinggian antara 100-1.266 diatas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai \pm 200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8 %), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (> 40 %).

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan laut sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong beriklim tropis. Dalam periode bulan Januari – Desember 2016, suhu udara maksimum dapat mencapai 32,16°C dan suhu minimum mencapai 22,10°C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016 adalah 26,58°C. Pada tahun 2016, curah hujan rata-rata 15,67 mm, hari hujan 267,00 hari, kecepatan angin 7,16 knot dan penguapan 5,64 mm. Potensi hidrologi di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan air minum, irigasi, transportasi, dan untuk kepentingan lainnya,(sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah).

Wilayah Tapanuli Tengah dipengaruhi oleh 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu DAS Tapus, DAS Aek Sirahar, DAS Lae Chinong, DAS Aek Sibudong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batang Toru. Daerah hulu sungai berasal

dari pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara di wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagian sungai telah dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. seperti aliran Sungai Sibuluan untuk PLTA Sipan Sihaporas, yang memiliki kapasitas daya listrik 50 MW dan untuk air minum, dermaga, tempat sandar kapal perikanan, maupun irigasi yang mendukung pertanian.

4.1.3 Kondisi Demografi Kabupaten Tapanuli Tengah

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis, antara lain etnis Pesisir, Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh, dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis, memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi.

Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat, serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah "Sahata Saoloan" atau "seia sekata". Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2016 sebesar 356.918 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 163 jiwa per km². Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pandan sebesar 51.788 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.509 jiwa per km². Komposisi penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2016, yaitu laki-laki sebesar 179.194 jiwa (50,21%), perempuan 177.724 jiwa (49,79), dan jumlah rumah tangga sebesar 76,601,

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Tapanuli Tengah 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Pinangsori	11.828	11.872	23.700	99,63
2.	Badiri	12.318	12.931	25.249	95,26
3.	Sibabangun	8.934	8.937	17.871	99,97
4.	Lumut	5.179	5.337	10.516	97,04
5.	Sukabangun	1.935	1.994	3.929	97,04
6.	Pandan	26.404	25.384	51.788	104,02
7.	Tukka	7.812	7.722	15.534	101,17
8.	Sarudik	12.687	12.136	24.823	104,54
9.	Tapian Nauli	12.022	11.596	23.618	103,67
10.	Sitahuis	2.927	2.830	5.757	103,43
11.	Kolang	9.307	9.670	18.977	96,25
12.	Sorkam	9.326	9.382	18.708	99,40
13.	Sorkam Barat	8.600	9.623	17.223	99,73
14.	Pasaribu Tobing	3.829	3.884	7.713	98,58
15.	Barus	9.193	9.203	18.396	99,89
16.	Sosorgadong	7.516	7.593	15.109	98,99
17.	Andam Dewi	8.243	8.118	16.361	101,54
18.	Barus Utara	2.408	2.394	4.802	100,58
19.	Manduamas	11.270	10.874	22.144	103,64
20.	Sirondorong	7.456	7.244	14.700	102,93
	Jumlah	179.194	177.724	356.918	100,83

Sumber : Bps kabupaten Tapanuli Tengah (www.tapteng.go.id)

4.1.4 Struktur Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan jumlah produksi yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang merupakan suatu gambaran tingkat perubahan ekonomi suatu daerah. Bagi suatu daerah hal ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang dicapai dan dapat digunakan sebagai alat menentukan arah kebijakan pembangunan selanjutnya.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut ini PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah atas dasar harga konstan

Tabel 4.3
PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Sektor	PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	130083.5	136513.71	145439.4	156280.7	167169.6
B. Pertambangan dan Penggalian	75460.66	80261.85	86552.79	93231.8	100749.2
C. Industri Pengolahan	38496.6	40861.59	43824.06	46264.2	49047.94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	55611.51	58852.59	61214.67	61520.3	64924.14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109804.18	115778.41	122343.04	129830.4	138134.13
F. Konstruksi	15825.77	16709.84	17715.77	18640.7	19586.49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	434853.63	463406.63	487829.3	503672.5	531030.23
H. Transportasi dan Pergudangan	59060.84	62295.61	65422.85	68722	72387.52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19994.68	20729.44	21403.3	22217.5	23262.67
J. Informasi dan Komunikasi	4935.12	5240.61	5560.29	5855.1	6185.54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5460846.09	5738320.51	6032212.59	6348241.23	6678155.65
L. Real Estate	2703787.01	2830577.29	2965727.64	3110359.40	3265066.31
M,N. Jasa Perusahaan	15011.85	15773.87	16878.04	18407.8	19576.21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	647728.09	664119.32	687958.01	708594.88	731729.67
P. Jasa Pendidikan	26938.97	27427.11	28838.54	33683.2	36171.7

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5644.56	5963.68	6367.4	6821.55	7314.07
R,S,T,U. Jasa lainnya	541300.75	570564.59	602516.2	657017	694447.69
PDRB	576308.36	623244.35	666621.28	707122.2	751372.53

Sumber: Kabupaten Tapanuli Tengah Atas Dasar Harga Konstan (www.tapanulitengahkab.bps.go.id)

Dari tabel PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, dapat kita lihat terjadi kenaikan setiap tahunnya selama periode 5 tahun tersebut. Pada tahun 2014 jumlahnya adalah 576308.36 dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 623244.35 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 751372.53. Sektor yang paling tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah selama 5 tahun terakhir adalah sektor jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2018 dengan memberikan sebesar Rp. 6678155.65 juta. Dari sektor tersebut kontribusi terbesar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 5 tahun terakhir. Kemudian sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar Rp. 4935.12 juta. Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2018 terus mengalami kenaikan, hingga tahun 2018 sebesar 167169.6.

4.2 Perkembangan Sektor Perikanan di Sumatera Utara dan Tapanuli Tengah

4.2.1 Perkembangan Sektor Perikanan di Sumatera Utara

Potensi kelautan dan perikanan Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana potensi perikanan tangkap terdiri potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan produksi perikanan budidaya terdiri budidaya tambak 20.000 Ha dan budidaya laut 100.000 Ha, budidaya air tawar 81.372,84 Ha

dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan pesisir Sumatera Utara mempunyai panjang pantai 1300 Km yang terdiri dari panjang pantai timur 545 km, panjang pantai Barat 375 km dan Kepulauan Nias dan pulau-pulau baru sepanjang 350 Km.

Sedangkan wilayah pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yang terdiri dari:

1. Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 Kabupaten/kota yang berada di wilayah pantai Barat Yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana potensi pengembangan wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan Ikan, dan budidaya laut yang terdiri rumput laut, kerapu, kakap. Budidaya tawar yang terdiri dari mas, nila, lele, patin, gurame, tawes dan nilam. Budidaya tambak yang terdiri dari Udang vaname, udang windu, kerapu, kakap, dan bandeng.

2. Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara

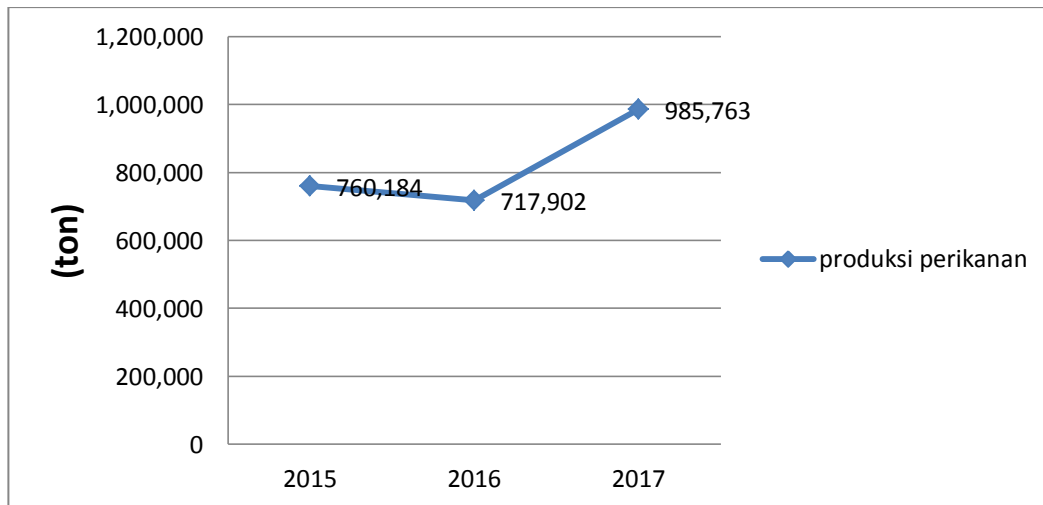
Kabupaten/kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah Wilayah yang berada di wilayah tengah provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 kabupaten/kota yaitu kabupaten tapanuli Utara, kabupaten toba samosir, kabupaten karo, kabupaten dairi, kabupaten samosir, kabupaten humbang hasundutan, kabupaten simalungun, kota pematang siantar, kota tebing tinggi, kabupaten pakpahan barat. Sedangkan potensi pengembangan

pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan. Budidaya air tawar yaitu nila, mas, lele, paten dan gurame.

3. Wilayah pantai timur Sumatera utara

Terdapat 11 kabupaten/kota yang termasuk pada wilayah pantai timur Sumatera Utara yang terdiri dari kabupaten langkat, kota binjai, kabupaten serdang bedagai, kabupaten deli serdang, kabupaten asahan, kabupaten labuhan batu, kabupaten labuhan batu utara, kabupaten labuhan batu selatan, kabupaten batu bara, kota medan, kota tanjung balai,. Dimana potensi pengembangan wilayah timur sumatera utara adalah penangkapan ikan dan pengolahan ikan. Budidaya laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau. Budidaya tawar yaitu mas, nila, lele, patin, gurame, grass carp, lobster air tawar, bawal tawar dan ikan hias. Budidaya tambak yaitu rumput laut, udang vaname, udang windu, kerapu, kakap, bandeng, sedangkan budidaya perairan umum yaitu mas, nila.

Berikut total produksi perikanan sumatera utara:



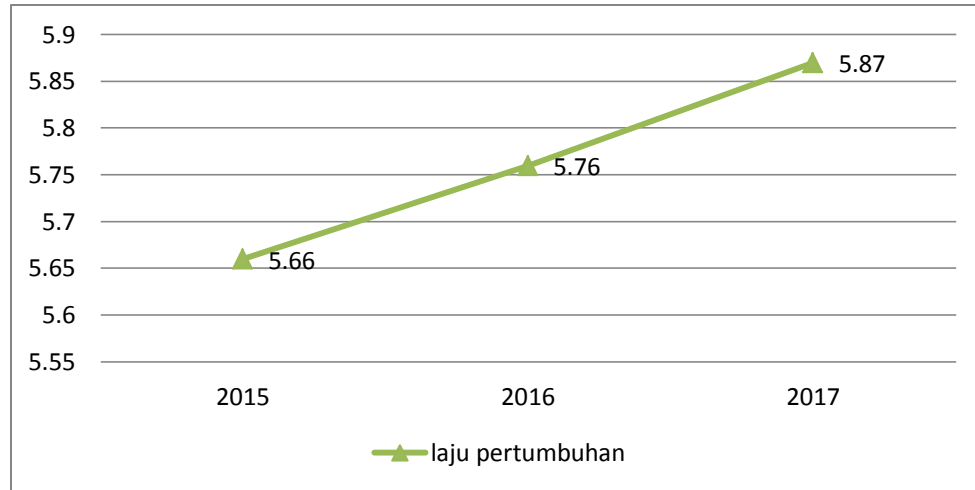
sumber: bps sumatera utara

Gambar 4.2 Produksi Perikanan Sumatera Utara

Dari data produksi perikanan Sumatera Utara diatas menunjukkan pada tahun 2015 produksi perikannya sebesar 760.184 ton sedangkan pada tahun 2016 produksi perikanan sumatera utara mengalami penurunan sebesar 42.282 ton sehingga total produksi perikanan sumut tahun 2016 sebesar 717.902 ton penurunaan ini di sebabkan oleh sektor perikanan tangkap dimana pada tahun 2016 gangguan cuaca yang terus terjadi menyebabkan frekuensi melaut dikalangan nelayan menjadi rendah, gangguan cuaca yang terjadi seperti gelombang ombak yang besar dan arus kencang walaupun produksi perikanan sumatera utara mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB perikanan sumatera utara mengalami kenaikan dengan nilai 5,76%. Kenaikan laju pertumbuhan PDRB sumut tidak hanya dari faktor produksi perikanan, melainkan juga dari faktor produksi pengolahan ikan, seperti pengasinan dan juga pengalengan ikan.

Sedangkan pada tahun 2017 produksi perikanan sumatera utara mengalami kenaikan yang cukup tinggi dimana produksinya adalah 985.763 ton. Kenaikan produksi perikanan tahun 2017 dikarenakan buah hasil dari kebijakan pemerintah yang konsisten memberantas penangkapan ikan yg ilegal. Kebijakan ini telah mengurai secara derstis pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal asing. Selain itu ketegasan pemerintah tentang menenggelamkan kapal asing pencuri ikan telah membuat kapal-kapal ikan asing jera mencuri ikan di perairan Indonesia, selain itu juga kebijakan pemerintah tentang pemberantasan IUU *fishing* juga diimplementasikan dengan penyabutan izin kapal-kapal eks asing dan larangan alih muat (transshipment) ikan di tengah laut. Seiring dengan meningkatnya produksi

perikanan tahun 2017 maka laju pertumbuhan PRDB perikanan Sumatera Utara mengalami kenaikan dengan nilai 5,87%.



Sumber : spb Sumatera Utara

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Sumatera Utara 2015-2017

Tabel 4.4 Ekspor Provinsi Sumatera Utara Dan Share Sektor Perikanan Sumatera Utara 2015-2017

Tahun	ekspor provinsi sumut		ekspor nasional		share sumut(%)	
	volume (kg)	nilai (usd)	volume (kg)	nilai (usd)	volume(%)	nilai(%)
2015	84.096.754	291.626.513	1.076.204.061	3.943.700.658	7,81	7,39
2016	77.915.690	310.259.272	1.075.195.007	4.172.252.602	7,25	7,44
2017	69.918.084	355.425.285	1.078.254.835	4.513.886.763	6,48	7,87

Sumber: bps-diolah

Volume ekspor perikanan provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2017 mengalami penurunan seperti pada tahun 2015 volume ekspor perikanan Sumatera Utara yaitu 84.096.7554 kg mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 77.915.690 dan begitu juga pada tahun 2017 volume ekspor perikanan Sumatera

utara 69.918.084. Tidak hanya ekspor perikanan Sumatera Utara ekspor perikanan nasional juga mengalami penurunan, pada tahun 2015 ekspor perikanan nasional adalah 1.076.204.061 kg mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu 1.075.195.007 kg, sedangkan pada tahun 2017 ekspor perikanan nasional mengalami peningkatan dengan berat 1.078.254.835 kg. Salah satu penyebab turunnya ekspor perikanan pada tahun 2016 adalah peraturan menteri tentang dilarangnya kapal asing melaut di perairan Indonesia dan di tenggelamkan apabila melanggarnya, sehingga penurunan ekspor ke negara-negara yang kapalnya di tenggelamkan seperti Cina, Filipina, dan Thailand, selain itu pembekuan izin terhadap kapal-kapal yang berbobot besar salah satu penyebab rendahnya ekspor. Sedangkan untuk nilai ekspor perikanan Sumatera Utara dari tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2015 nilai ekspor perikanan Sumatera Utara adalah 291.626.513 USD mengalami kenaikan 310.259.272 USD pada tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2017 nilai ekspor perikanan adalah 355.425.285 USD. Sedangkan nilai share (distribusi) volume ekspor perikanan Sumatera Utara terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Nilai share volume ekspor perikanan tahun 2015 sebesar 7,81% mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 7,25% dan pada tahun 2017 share volume ekspor perikanan Sumatera Utara sebesar 6,48%. Sedangkan untuk share nilai ekspor perikanan Sumatera Utara terus mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2015 nilai share ekspor perikanan sebesar 7,39% mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 7,44%. Sedangkan pada tahun 2017 nilai share ekspor perikanan Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 7,87%.

4.2.2 Perkembangan Sektor Perikanan di Tapanuli Tengah

Secara umum potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya, potensi perikanan Samudera Hindia, jumlah nelayan dan kapal penangkapan ikan, fasilitas pendukung perikanan dan industri berbasis komoditi perikanan.

1. Produksi dan Potensi Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2009 adalah 22.329,40 ton, meliputi produksi perikanan tangkap di Laut 20.731,60 ton, produksi perairan umum di Darat 463,50 ton, produksi budidaya di Laut 714,20 ton, dan produksi budidaya di Darat 420,10 ton.

Penangkapan Ikan secara tradisional di pesisir Pantai Kab. Tapanuli Tengah Keramba Ikan Apung di Kec. Tapan Nauli

Bagan Penangkap Ikan di Laut

Budidaya Tambak Udang di Kabupaten Tapanuli Tengah

Penangkapan Ikan Sumatera Utara di Samudera Hindia pada tahun 2006 adalah sangat besar, yaitu 95.459,00 ton atau 10,41 % dari potensi pemanfaatannya.

Hasil tangkap Ikan Tuna oleh Kapal Motor Nelayan di Tapanuli Tengah terutama untuk jenis Tuna Mata Besar (Big Eye Tuna), Madidihang (Yellowfin Tuna), Albacora (Longfin Tuna), dan Cakalang (Skipjack Tuna).

2. Jumlah Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan

Jumlah rumah tangga Nelayan yang menggunakan Perahu pada tahun 2009, yaitu Jukung 269, Perahu Kecil 585, Perahu Sedang 76.

Rumah Tangga Nelayan yang menggunakan Jukung dan Perahu Kecil di Kedai Gedang – Barus, Jagojago dan Sitardas – Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Bantuan Kapal Motor dan Jaring Apung kepada Nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jumlah rumah tangga Nelayan yang menggunakan Kapal Motor sebanyak 723 pada tahun 2009, yaitu ≤ 5 GT sebanyak 540, 5-9 GT sebanyak 81, 20-30 GT sebanyak 68 dan ≥ 30 GT sebanyak 34.

Pada tahun 2010, jumlah perahu penangkap ikan laut menurut jenis kapal yaitu Perahu Tanpa Motor 793 unit, Perahu Motor Tempel 417 unit, Kapal Motor 568 unit, sehingga jumlah seluruhnya adalah 1.766 unit.

Kapal Penangkap Ikan Jenis Bagan

Kapal Penangkap Ikan Jenis Pukat Ikan dan Pukat Cincin di Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah

Kapal Penangkap Ikan Fiber di PPN Sibolga, Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah

Kapal Penangkap Ikan Fiber di Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah rumah tangga Nelayan Budidaya Perikanan sebanyak 524 meliputi Tambak 7, Kolam 365, Kolam Air Sawah 143, Kolam Jaring Apung 9.

Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah

Budidaya Lele di Kabupaten Tapanuli Tengah

3. Fasilitas Pendukung Perikanan

- Adanya Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Sibabangun

Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah

- Adanya TPI dan Steiger Perikanan di beberapa Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

TPI di Barus & Andam Dewi

TPI di Sorkam dan Steiger di Pandan & Manduamas

- Adanya PPI Labuan Angin di Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah

Steiger dan Gedung Cold Storage PPI Labuan Angin di Kecamatan Tapan Nauli

Gedung Perkantoran, Gudang dan Tempat Lelang di PPI Labuan Angin

- Adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah

- Adanya SPDN di Kecamatan Barus dan sekitarnya

- Adanya APMS oleh PT. Non Fasilitas di Kompleks PPN Sibolga, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung BBM untuk bidang Perikanan

- Adanya Cold Storage dan Pabrik Es oleh berbagai perusahaan swasta di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Pondok Batu, Kecamatan Sarudik

Pabrik Cold Storage Perikanan di Kecamatan Sarudik

Dukungan ketersediaan Pabrik Es untuk Perikanan Tangkap di Kab. Tapanuli Tengah

- Adanya Pondok Informasi dalam mendukung program rehabilitasi Terumbu Karang dan pemberdayaan masyarakat nelayan

4. Industri Berbasis Perikanan

Berbagai perusahaan swasta di Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak dibidang Industri Cold Storage, Pabrik Es, Pabrik Tepung Ikan, Pengemasan Ikan Hasil Tangkap, Pengasinan Ikan, dan Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor – Impor Hasil Perikanan Tangkap.

Ekspor produk hasil perikanan Tapteng pada tahun 2013 ini dipastikan akan meningkat dibandingkan dengan pada tahun lalu. Sebab, pada semester I atau hingga Juni 2013, ekspor produk perikanan Tapteng Sibolga sudah mencapai 1.213 ton. Pada tahun 2012 lalu, dua perusahaan eksportir yakni PT Samudera Perkasa Abadi (SPA) dan PT Anugerah Samudera Hindia (ASAHI) hanya mampu mengekspor 1.357 ton jenis frozen skipjack cooked loin (cakalang masak beku) serta frozen yellowfin cooked loin (madidihang/sisik masak beku).

Sebab, produk ekspor oleh dua perusahaan eksportir selama semester pertama tahun 2013 ini saja sudah hampir melebihi jumlah ekspor pada tahun lalu. jumlah tersebut tidak tertutup kemungkinan masih jauh lebih rendah dibanding dengan angka produk ekspor produk perikanan Tapteng sebenarnya dari seluruh perusahaan yang ada di Tapteng dan Sibolga. Sebab, data SHTI yang mereka peroleh hanya khusus untuk ekspor yang berhubungan dengan negara Uni Eropa saja. Sementara, kemungkinan masih ada beberapa perusahaan di Tapteng Sibolga yang melakukan

ekspor ke negara-negara Asia saja, seperti Thailand, Oman, Korea, India dan lain sebagainya.

Pemerintah hanya mewajibkan ekspor ke Uni Eropa saja yang harus memiliki SHTI sebagai standar mutu, kualitas dan keamanan yang memang dijadikan sebagai syarat utama negara-negara pengimpor seperti Spanyol, Italia dan Portugal. Sementara ekspor produk perikanan ke negara-negara Asia seperti Thailand, Oman, Korea, Singapura dan sebagainya, peraturannya tidak terlalu ketat. Sehingga perusahaan-perusahaan eksportir secara langsung mengeksport produk mereka. Seluruh kapal penangkap ikan jenis Tuna dengan panjang di atas 24 meter yang melakukan penangkapan di atas area IOTC, kapal tersebut wajib didaftarkan di IOTC. Kapal-kapal yang tercantum dalam IOTC atau *Commission on Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO),

4.3 Konsep Perencanaan dan Pengembangan Minapolitan Kabupaten Tapanuli Tengah Pasca Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

- A. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12/MEN/2010 tentang Minapolitan perlu ditetapkan pedoman umum minapolitan;
- B. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Pada tahun 2011 hingga 2014 kawasan Minapolitan Tapteng merupakan kawasan persiapan, baru kemudian Tapteng diharapkan akan menjadi kawasan Minapolitan yang maju. Mulai tahun 2011 lalu, pembangunan infrastruktur sudah dimulai. Ditargetkan seluruh pembangunan infrastruktur ini akan selesai tahun 2014. Dengan dijadikannya Tapteng menjadi kawasan Minapolitan, menjadikan Tapteng sebagai sentra industri perikanan di seluruh kawasan Pantai Barat ini, Kawasan Minapolitan Tapteng nantinya akan dibagi menjadi beberapa zona, yakni Zona Penangkapan, Zona Inti, Zona Pengembangan dan Pendukung serta Zona Keterkaitan. Zona Penangkapan itu adalah kawasan para nelayan penangkap ikan, Zona Inti adalah PPN Sibolga, Zona Pengembangan dan Pendukung adalah daerah-daerah pendukung kawasan ini seperti Kota Sibolga, Sorkam, Barus dan lain sebagainya. Sedangkan Zona Keterkaitan adalah daerah kabupaten kota yang berdekatan dengan Tapteng, seperti Tapsel, Madina, Nias, Singkil dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Potensi kelautan dan perikanan Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana potensi perikanan tangkap terdiri potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan produksi perikanan budidaya terdiri budidaya tambak 20.000 Ha dan budidaya laut 100.000 Ha, budidaya air tawar 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan pesisir Sumatera Utara mempunyai panjang pantai 1300 Km yang terdiri dari panjang pantai timur 545 km, panjang pantai Barat 375 km dan Kepulauan Nias dan pulau-pulau baru sepanjang 350 Km.
2. Secara umum potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya, potensi perikanan Samudera Hindia, jumlah nelayan dan kapal penangkapan ikan, fasilitas pendukung perikanan dan industri berbasis komoditi perikanan. Salah satunya adalah Industri Berbasis Perikanan berbagai perusahaan swasta di Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak dibidang Industri Cold Storage, Pabrik Es, Pabrik Tepung Ikan, Pengemasan Ikan Hasil Tangkap, Pengasinan Ikan, dan Perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor – Impor Hasil Perikanan Tangkap.

3. Dengan konsep minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Sebelumnya juga pemerintah setempat sudah mengusungkan Tapanuli Tengah sebagai kawasan minapolitan. Namun, belum ada kejelasan kapan tepatnya rancangan tersebut dapat direalisasi secara menyeluruh. program minapolitan sesungguhnya telah ada sejak dulu. Anggaran untuk penerapannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Tapteng sangat layak menjadi poros Minapolitan, dengan didukung keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, yang letaknya di Kabupaten Tapteng

5.2 SARAN

1. Pemerintah Indonesia seharusnya memperhatikan sumber perikanan yang dapat dimanfaatkan melalui penangkapan ikan (perikanan tangkap) dan budidaya ikan. Karena sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor perikanan dikelola secara serius, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.
2. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi perikanan yang cukup besar mengingat wilayahnya dikelilingi laut yang dapat dikembangkan untuk menjadi komoditi perikanan tangkap laut dan budidaya perikanan laut. Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan jumlah produksi kelautan dan

perikanan, meningkatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha-usaha kelautan dan perikanan, meningkatkan lapangan kerja dan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan, meningkatkan konsumsi ikan dan terpenuhinya bahan baku industri perikanan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L, (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi Daerah*. Yogyakarta
- Administrator. (2016). *Lima Kota Dengan Konsep Water Front City Terbaik Di Indonesia*. pemkomedan.go.id
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2006). *Panduan Teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut, Merupakan Jabaran Teknis Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 34 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia
- Faruk, Fahrulraz M. (2017). *Refleksi Indonesia Sebagai Negara Maritim*. Geotimes.co.id
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mulyadi. (2005). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahardja, Pratama dan Mandalla Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Edisi keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Somba, Henry Roy. (2014). *Konsep WaterFront City. Solusi Mengelolah Bantaran Sungai*. Sulawesi Utara
- Sugiono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Wolverine, Huges. (2018). *Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Terbesar Di Dunia*. kaskus.co.id

Wandoka, Sarbia. (2012). *Kawasan Minapolitan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan*. Ambon

Jurnal :

Adhihapsari, Wirastika. Semedi, Bambang. Mahmudi, M. (2014). *Perencanaan Pengembangan Wilayah Kawasan Minapolitan Budidaya di Gandusari Kabupaten Blitar*. Mahasiswa Program Pascasarjana FPIK Universitas Brawijaya. J-PAL, Vol. 5, No. 2

Baruadi, Alfi Sahri R. Simbolon, Domu. Yusfiandayani, R. (2012). *Model Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara*. Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol. 3. No. 1

Cahya, Darmawan L dan Mahreza, Muhammad D. (2013). *Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Esa Unggul. Jurnal Planesa Volume 4, Nomor 2